

V. PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN

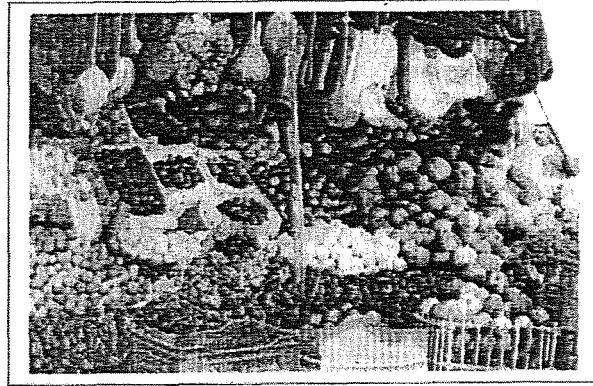
Maggy Thenawidjaja Suhartono

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Indonesia

Tak ada seorang pun dari kita yang tidak mempunyai perhatian pada pangan. Pangan adalah kebutuhan primer manusia. Kehidupan yang normal dan nyaman bergantung pada ketersediaan pangan yang aman dan bergizi yang terjamin keberadaannya pada saat dibutuhkan. Pada tingkat paling sederhana, jaminan tersedianya bahan pangan sangat berpengaruh terhadap tata dan kualitas kehidupan berkeluarga. Pada tingkat lebih tinggi. Ukuran index harga bahan makanan pokok menjadi refleksi bagaimana baik buruknya pengelolaan penyediaan pangan secara lokal, dan secara nasional. Martabat suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana masyarakatnya makan secara cukup, dengan berbagai indeks konsumsi pangan sehat dan parameter gizi serta kesehatan yang baik. Pangan dan perilaku budaya dan politik memiliki hubungan timbal balik. Negara-negara yang mampu mengelola dengan baik penyediaan hak rakyatnya akan pangan akan mampu bergerak lebih mantap, lebih percaya diri, lebih bermartabat dan umumnya memiliki peri kehidupan yang lebih aman baik secara fisik maupun secara emosi. Negara-negara yang mampu mengelola penyediaan pangan untuk negara lain umumnya memiliki peranan politik yang lebih berpengaruh.

Pasar rakyat dan Swalayan

Pemenuhan hak atas pangan masyarakat menyangkut banyak pihak, mulai dari produsen, tata kelola distribusi dan perdagangan pangan, perilaku pemerintah dalam hal pengelolaan, penyediaan dan pemberlakuan regulasi serta mengelola pengaruh dari luar. Masing-masing memiliki peranan spesifik yang sangat mempengaruhi efisiensi pemenuhan ketersediaan pangan secara baik, efektif dan bermanfaat.



Saat ini konsumen yang menghendaki bahan pangan mentah (sayur, buah, daging) dengan kualitas baik dan dijamin pada tempat bersih akan memilih pergi ke swalayan yang keberadaannya memang semakin menjamur. Namun demikian dipinggiran kota besar, di kota-kota kecil dan pedesaan masih banyak praktek-praktek pasar tumpah, atau pasar dadakan yang dilakukan pada pagi hari (subuh) dan malam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dan banyak di Asia lainnya masih menginginkan suasana pasar informal dimana pembeli berinteraksi secara lebih aktif dengan penjual, menawar, tukar informasi bahkan bergosip baik dengan penjual maupun sesama pembeli. Di banyak negara, pasar merupakan kebutuhan fisik maupun kebutuhan emosional, bahkan menjadi semacam Community Center, disamping sebagai penyedia pangan. Seharusnya pemerintah Indonesia bersikap lebih proaktif merespon kebutuhan ini. Dengan membangun lebih banyak pasar rakyat yang mudah diakses, tetapi juga yang higienis dan keamanannya terjaga. Disamping memenuhi kebutuhan pangan pangan yang berkualitas bagi masyarakat kecil, pasar rakyat semacam ini dapat menjadi daya tarik turisme tersendiri. Pasar rakyat yang higienis dan aman memerlukan fasilitas kebersihan, dan tim inspeksi dari pemerintah daerah dan aparatnya secara terus menerus memantau keamanan pangan yang diperdagangkan, terlebih lagi bagi komoditas yang mudah rusak seperti daging dan ikan, termasuk kesinambungan memantau pangan yang berlabel dan masa kadaluarsa.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan garis kemiskinan

Dilihat dari kaitan garis kemiskinan dan indikator ketersediaan pangan, Indonesia, mengadopsi pengukuran garis kemiskinan sebagai biaya yang diperlukan untuk memperoleh sekeranjang makanan dengan kandungan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan biaya untuk memperoleh hal-hal diluar bahan makanan yang dianggap penting. Di Indonesia, ditemukan keadaan yang tidak merata pada masyarakat dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya.

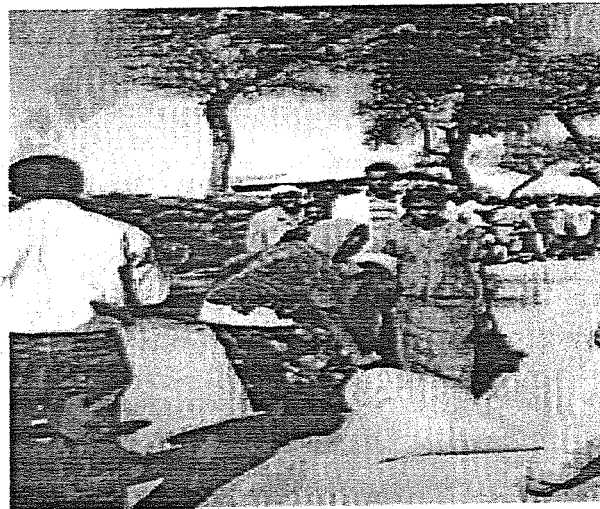


Memiliki peta kerawanan pangan bagi Indonesia yang memiliki daerah luas adalah suatu keharusan, supaya penanganan dan koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kerawanan pangan dapat mencapai sasaran kelompok target.

Tentulah bagi daerah yang ditunjuk sebagai daerah rawan pangan (warna merah pada peta) diperlukan usaha penyediaan dan distribusi serta semua perangkat penunjangnya (seperti transportasi) pembiayaan, dan koordinasi yang lebih keras lagi. Daerah-daerah yang menurut peta rawan pangan termasuk ke dalam kategori daerah aman, dapat turut memasok pangan bagi daerah yang lebih rawan pangan. Biar bagaimanapun, suatu keadaan dimana ada kelompok yang sangat

berlebihan dalam konsumsi pangannya berbarengan dengan adanya kelompok yang sangat berkurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya bukanlah suatu keadaan yang optimum dan cenderung akan menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan. Program sumbangan pangan seperti food stamp yang dilakukan di Amerika yang memang bertujuan mengatasi pemenuhan hak atas pangan bagi orang miskin seharusnya direncanakan dan dipersiapkan dengan lebih baik dan pelaksanaannya menyesuaikan diri dengan kondisi lokal dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga tidak lagi bersifat tambal sulam dan rawan korupsi.

Beberapa tahun ini, kita disadarkan akan betapa rapuhnya Indonesia terhadap bencana alam. Seharusnya informasi peta daerah bencana dan daerah rawan bencana dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk merespon secara cepat dan efektif kebutuhan pangan tambahan yang harus diatasi pada kejadian bencana alam, apalagi bencana alam yang terjadi sering berulang (dapat diprediksi). Dukungan donor baru dan sumbangan masyarakat yang dilakukan saat ini tentu saja merupakan hal yang sangat baik. Namun demikian, tetap saja, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tetaplah sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah. Sumbangan masyarakat dapat dijadikan tambahan dan bukan sebaliknya.



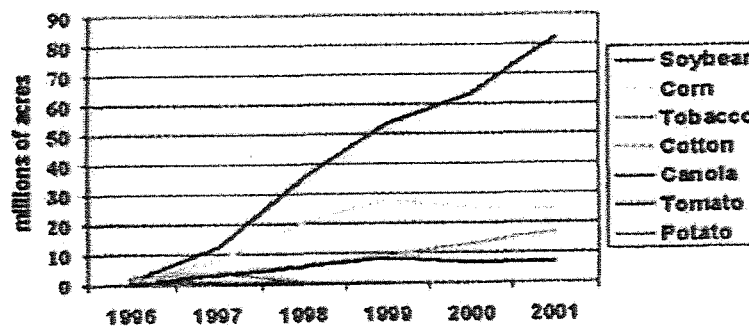
Menggunakan pendekatan teknologi dalam usaha memenuhi hak atas pangan

Walaupun Indonesia termasuk dalam negara yang cenderung menunjukkan perbaikan dalam hal memenuhi hak masyarakatnya atas pangan, negara perlu melakukan usaha "all out" dalam produksi dan penyediaan pangan, apalagi saat harga-harga bahan pangan pokok termasuk rentan terhadap berbagai gejolak yang berkembang di masyarakat. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa beberapa komoditas yang penting bahkan beraspun masih diimport dari negara lain. Pemerintah memang harus bekerja keras mulai dari peningkatan teknologi produksi, perluasan area produksi pangan, memperbaiki tata kelola pemasaran dan perangkat distribusi sampai mengelola program sosial yang berkeadilan dalam menjamah kelompok target yang paling rawan. Perkembangan teknologi sejak "*Green revolution, Blue revolution, White biotechnology*", sampai pada "*Food Technology*" perlu diadopsi secara terencana, rasional dan cermat dengan memperhatikan daya guna dan manfaat teknologi yang diadopsi serta situasi lokal.

Green revolution telah berpengaruh banyak dalam produksi bahan pangan. Penyediaan bibit unggul, perluasan area tanam, modernisasi dan mekanisasi pertanian, pemanfaatan obat-obatan pembunuh hama dan teknologi pasca panen telah terbukti sangat bermanfaat dalam meningkatkan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat banyak. Hal yang sama dirasakan pula bagi efek blue revolution. Namun demikian, praktek-praktek yang cenderung serakah dalam temuan teknologi yang dibuahkan oleh Green dan Blue revolution mengakibatkan orang menengok dan lebih memperhatikan bahaya kerusakan lingkungan, sehingga melahirkan White biotechnology yang mengikut sertakan perhatian lebih besar terhadap lingkungan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Peningkatan produksi bahan pangan, khususnya padi dan gandum karena proses intensifikasi dan ekstensifikasi masih belum menghilangkan sepenuhnya kelaparan dan ketakutan akan kekurangan pangan. Ketergantungan terhadap pasokan bibit unggul, kekurangan pupuk dan obat-obatan pembasmi hama adalah beberapa efek samping revolusi hijau yang belum terkelola dengan baik. Disamping itu, perluasan area tanam di negara miskin masih tetap menjadi milik segelintir orang saja.

Semua revolusi yang memiliki pengaruh besar pada produksi pangan menuntut pemakainya untuk melek terhadap temuan ilmu dan teknologi sehingga dapat memanfaatkannya secara maksimum. Era Food Biotechnology lebih lagi, telah menunjukkan bagaimana ilmu dan teknologi bahkan ilmu yang berkarakteristik dasar dengan riset-riset ilmiah yang sangat intensif telah mampu mendorong temuan revolusioner yang dapat dimanfaatkan secara luar biasa untuk produksi dan penyediaan bahan pangan. Semakin canggih teknologi, semakin besar pula tuntutan untuk memahaminya secara baik sehingga dapat memanfaatkannya secara intensif, sekaligus mencegah kemungkinan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan. Tidak ada stupun teknologi yang apabila dipraktikkan bebas dari resiko. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola resiko tersebut, kalau memang aplikasinya dirasakan banyak memberikan keuntungan. Adalah kewajiban suatu negara untuk melaksanakan pendidikan yang baik bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat menjadi pintar untuk memilih (diantara sekian banyak pilihan yang ada) mana yang paling berguna untuk kehidupan mereka.

Global area of transgenic crops 1996 - 2001



Informasi yang diperoleh sampai awal abad ke 20 menunjukkan bahwa buah dari era bioteknologi pangan, yaitu produk-produk pangan transgenik telah dipasarkan secara luas di banyak negara. Walaupun pada kenyatannya, negara-negara yang banyak penduduknya seperti Cina dan Amerika latin (selain Amerika dan Canada) telah memanfaatkan produk transgenik, banyak kelompok masyarakat menunjukkan respon negatif terhadap produk hasil bioteknologi ini.

Masalahnya dapat merupakan kenyataan bahwa hanya sedikit yang benar-benar memahami teknologi canggih ini, karena kurangnya komunikasi dan penjelasan menyeluruh, sehingga ketidaktahuan ini diekspresikan sebagai tindakan penolakan. Ada beberapa alasan lain. Temuan pangan transgenik, seperti halnya dengan pangan yang diproduksi setelah revolusi hijau, tidak atau belum secara bombastis menunjukkan penyelesaian masalah kelaparan dan kemiskinan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa produksi pangan transgenik berkaitan erat dengan perusahaan multinasional, bisnis raksasa (karena memang mensyaratkan *input High Tech* yang mahal) dan masalah paten serta royalti yang secara mudah diartikan dengan jauhnya pemenuhan hak pangan orang miskin. Walaupun saat ini telah beredar pangan transgenik yang dibuat untuk masyarakat banyak (miskin) serta tidak mengaitkan dengan paten bagi penemunya seperti misalnya golden rice beta caroten, sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya menerima produk pangan yang sebenarnya potensial ini. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti :

- Amankah produk pangan transgenik?
- Apakah yang mengkonsumsinya tidak akan mengalami mutasi?

Menuntut negara dan pemerintah untuk memberikan penjelasan yang bersifat komunikatif, sederhana tetapi rasional (berdasarkan data percobaan dan nilai-nilai ilmiah yang objektif).